

Edisi Khusus Dies, Mei 2000, Th. XIX, No. 2

# **cakrawala pendidikan**

**MAJALAH ILMIAH KEPENDIDIKAN**

**PENERBIT LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**ISSN : 0216 - 1370**

# CAKRAWALA PENDIDIKAN

## Majalah Ilmiah Kependidikan

**Visi** : Menumbuhkan Cakrawala Berfikir Partisipatif dalam Pembangunan Nasional melalui IPTEKS.

**Misi** : Pemberdayaan dan Penajaman Orientasi Masyarakat Pendidikan Indonesia dalam Pembangunan Nasional

### **Penerbit**

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

### **Penanggungjawab**

Drs Sukidjo, M Pd

### **Ketua Penyunting**

Prof. Dr. H. Sodik A. Kuntoro, M.Ed.

### **Anggota Penyunting**

Prof. Dr. H. Wuryadi, MS.

Dr. Sumarno, MA.

Prof. Dr. Hj. Aliyah Rosyid, M.Pd.

Prof. Dr. Hj. Darmiyati Zuchdi, M.Sc.

Dr. Hj. Nurfina Aznam, Apt., SU.

Dr. Sarbini Hs.

Drs. Sukidjo, M.Pd.

Drs. H. Sukoco, M.Pd.

Drs. Bambang Subali, MS

DR. Soeharto, MSOE.

Drs. Wawan Sundawan, M.Ed.

Drs. Kastam Syamsi, M.Ed.

Drs. Bambang Priyanto

### **Penyunting Ahli**

Prof. Dr. H. Masrun, MA.

(UGM Yogyakarta)

Prof. Dr. Sabarti Akhadiah

(UNIV NEGERI JAKARTA)

Prof. Dr. H. Djohar, MS.

(UNIV NEGERI Yogyakarta)

Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir

(UAD Yogyakarta)

Prof. Dr. A. Syafii Maarif, MA.

(UNIV NEGERI Yogyakarta)

Dr. Suryanto

(UNIV NEGERI Yogyakarta)

### **Sekretariat**

Drs. Supantoro

Siti Mariana, S.Sos.

Sri Wiyati, B.Sc

Heni Susilowati

Widiyanto

### **SK MENTERI PENERANGAN RI :**

**STT Nomor 820/SK DITJEN PPG/STT/1981 Tanggal 9 Maret 1981**

**ISSN : 0216 - 1370**

### **Alamat Redaksi**

LPM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telpon 0274 - 586168 Psw. 233, 346, 359 dan 273

Fax. 0274 - 565500

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1 Human Resources Development Problem And Policies With Reference to Private Higher Education in Indonesia Oleh : Yahya Muhaimin	43 – 51
2 Pembaharuan Pendidikan Untuk Membentuk Manusia Indonesia baru Yang Siap Berkiprah Pada Abad 21 Oleh : Suwarsih Madya	52 – 61
3 Nilai Budaya Luhur Sebagai Landasan Pendidikan Menuju Indonesia Baru Oleh : Susilo Supardo	62 – 68
4 Pendidikan Tinggi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Baru di Era Reformasi Oleh : Hastuti	69 – 75
5 Reformasi Pendidikan Sains di Sekolah Dasar Upaya Strategis Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Baru Oleh Dadan Rosana	76 – 81
Pendidikan Demokrasi Dan Demokrasi Pendidikan Menuju Indonesia Baru Oleh A Daliman	82 – 87
7 Pengembangan Belajar Tuntas Dengan Penilaian Otentik Pada Sains Dan Matematika Oleh Suparwoto	88 – 95
Menata Kembali Pendidikan Kewiraan Pada Era Reformasi Oleh Sunarso	96 – 102
Reorientasi Metode Pembelajaran Kimia Menuju Indonesia Baru Oleh Sri Atun	103 – 107

ABSTRAK

in Indonesia  
particular  
Muhaimin  
will see  
been ta  
have u  
field of  
educati  
develop  
and t  
recom

I. 1

econo  
has b  
count  
but a  
natur  
belie  
streng  
cont  
or a  
main  
deve  
also  
"cate  
The  
has  
reso  
of th  
been  
can  
new

dev

## MENATA KEMBALI PENDIDIKAN KEWIRAAN PADA ERA REFORMASI

Oleh Sunarso

FIS Universitas Negeri Yogyakarta

### Abstrak

Pemasalahan pokok dalam tulisan ini adalah ingin mengakaji potret pendidikan Kewiraan yang selama ini diberikan sebagai mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi serta relevansinya pada era rformasi

Hasil pengkajian menunjukkan (1) pendidikan Kewiraan yang merupakan produk Orde Baru mulai diberikan di Perguruan Tinggi sejak tahun ajaran 1973/1974 perlu ditata kembali terutama berkaitan dengan materi dan metode pengajarannya (2) keluarnya UU No 20 tahun 1982 Tentang Pokok-pokok Hankam menegaskan bahwa Pendidikan Kewiraan merupakan PPBN tahap lanjutan, bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa. (3) keluarnya UU No 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1990 menegaskan bahwa Pendidikan kewiraan merupakan bagian dari pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dan harus masuk ke dalam kurikulum semua jenis jalur dan jenjang perguruan tinggi. (4) materi Pendidikan Kewiraan telah mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu dan penyempurnaan itu dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kewiraan di bawah koordinasi lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tetapi materi Pendidikan Kewiraan masih dianggap kurang sesuai degan semangat reformasi. (5) secara umum menurut penulis sebaiknya Pendidikan Kewiraan tetap ada dengan catatan materinya di revisi dengan memasukkan materi tentang demokratisasi hak asasi manusia, dan pasar bebas

Kata Kunci pendidikan kewiraan, era reformasi

### RECONSTRUCTION OF CIVIC EDUCATION IN THE REFORMATION ERA

#### Abstract

The main subject matter in this article is a study on civic education (pendidikan kewiraan).

and its relevance in the era of reformation

The results of the study indicate that (1) the civic education which has been taught in those institutions since the academic year of 1973/1974 needs to be reconstructed especially in terms of materials and teaching methods. (2) the 1982 Law No 20 on defence and security main points states that it is a continued phase of PPBN (short for Pendidikan Pendahuluan Bela Negara meaning National Defence Preliminary Education) and therefore an inseparable part of the national educational system and compulsory for all students in those insitutions (3) the 1989 Law No 2 and the 1990 Government Regulation No 30 state that it is a part of the citizenship education in those institutions and should be included in the curricula of all types, alternatives, and levels of study there. (4) from time to time its materials have undergone improvements made by a special work group on it coordinated by Lemhannas (short for Lembaga Pertahanan Nasional, meaning National Defence Institution) but there is still a consideration that the materials do not vet suit the spirit of reformation and (5) according to the writer it had better remain in the curriculum provided that the materials are revised by including those of democratization, human rights, and the free market

Key Words civic education, reformation era

### Pendahuluan

Arus reformasi yang bergulir dengan hebat di Indonesia dewasa ini menyebabkan di tolaknya nilai-nilai lama yang berbau status quo, padahal nilai-nilai baru belum ada Akibatnya terjadi ketidakpastian di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik, hukum, ekonomi dan sebagainya

Ketidakpastian itu juga berepengaruh terhadap pendidikan, khususnya pendidikan yang rentan terhadap perkembangan politik pada suatu negara Mata kuliah Pendidikan Kewiraan termasuk salah satu jenis mata kuliah yang rentan terhadap perkembangan politik karena dianggap sarat dengan doktrin, meskipun sebenarnya lebih dimaksudkan sebagai pendidikan bela negara

Sebagai mata kuliah dasar umum yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, Pendidikan Kewiraan diberikan dengan tujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian luhur, beriman dan bertakwa, berilmu dan menjadi pejuang yang patriotik. Pendidikan kewiraan ini agak berbeda dengan program Wajib Latihan Mahasiswa (WALAMA) yang pernah dilaksanakan sebelum tahun 1970-an. Jika WALAMA pada saat itu menitikberatkan pada kemampuan penalaran ilmiah tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional (Lemhannas, 1996: 4)

Tulisan ini ingin mengungkap beberapa permasalahan dengan pertanyaan fokus sebagai berikut: (1) bagaimanakah potret mata kuliah Pendidikan Kewiraan selama ini; (2) bagaimana bahan ajarannya; dan (3) bagaimana keberadaan mata kuliah ini dalam pembentukan sikap mahasiswa selaras dengan semangat reformasi

## Potret Pendidikan Kewiraan di Perguruan Tinggi

### 1. Perkembangan Pendidikan Kewiraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewiraan mulai diberikan di Perguruan Tinggi sejak tahun ajaran 1973/1974 dengan skala kelebihan dan kekurangannya telah mengalami perkembangan - perkembangan sebagai berikut:

Pertama, makin mantapnya landasan

Keamanan, maka dengan keluarnya UU No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, pendidikan kewiraan diakomodasikan dalam undang-undang tersebut, dengan dinyatakan bahwa pendidikan kewiraan merupakan bagian dari pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) tahap lanjutan

Kedua, adanya upaya untuk memenuhi tuntutan persyaratan tenaga pengajar pendidikan kewiraan di perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi S2 (Magister). Dalam hubungan ini,

sejak tahun akademik 1983/1984, telah dibuka Program Magister Pengkajian Ketahanan Nasional pada program Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia sebelum itu, sejak awal calon dosen pendidikan kewiraan (Suscados) di Lemhannas, dengan waktu terbatas (semula 5 minggu, kemudian menjadi 7 minggu)

K  
pada ku  
mantap.  
1973/19

kurikulum muatan nasional (Hastanas, 1997)

### 2. Pendidikan kewiraan Sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

kewiraan

kemampuan awal bela negara. Dalam penyelenggaraan PPBN melalui dua tahap yaitu tahap awal dan tahap lanjutan dengan sasaran terwujudnya warga negara Indonesia yang mengerti, menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara dengan unsur-unsur, kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, rela berkorban untuk negara serta memberikan kemampuan awal bela negara.

PPBN tahap awal diberikan kepada siswa SD, siswa SLTP dan siswa SLTA baik SMU maupun SMK. PPBN tahap awal tidak diberikan sebagai mata kuliah tersendiri mengingat beban kurikulum yang sudah sangat berat akan tetapi diselenggarakan secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti PPKN, Sejarah, geografi, agama dan sebagainya. Secara ekstra kurikuler PPBN dititipkan lewat Pramuka, PMI, PMR, Upacara Bendera dan sebagainya. Sedangkan PPBN tahap lanjutan diberikan di Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah tersendiri yaitu dalam bentuk Pendidikan Kewiraan (Sunarso dan Kus Eddy Sartono, 1997:4).

### 3. Pendidikan kewiraan sebagai Bagian dari Pendidikan kewarganegaraan

Amanat perlunya pendidikan Kewiraan tertuang dalam UU No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 (2) menyatakan bahwa di setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pada jenjang pendidikan tinggi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan antara lain melalui Pendidikan Kewiraan (Lemhannas, 1997:2).

Dari penjelasan UU No 2 tahun 1989 tersebut dapat ditangkap pengertian Pendidikan kewiraan hanya mengemban tugas menyelenggarakan Pendidikan Pendahuluan bela Negara saja. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan

dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara atau Pendidikan Kewiraan pada jenjang pendidikan tinggi. Itu berarti Pendidikan Kewarganegaraan meliputi juga Pendidikan Kewiraan, atau Pendidikan Kewiraan merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan (Lemhannas, 1997:3).

Kenyataannya ialah Pendidikan Kewarganegaraan tidak dirancang dan dikembangkan secara khusus, sebagai mata kuliah tersendiri dalam rumpun Mata Kuliah Umum di Perguruan Tinggi. Di Sekolah Menengah Umum Kewarganegaraan diajarkan dalam satu paket dengan pendidikan Pancasila dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Materi pendidikan dan Kebudayaan dalam keputusan No 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa menetapkan bahwa Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewiraan / Kewarganegaraan termasuk dalam mata kuliah umum dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Itu berarti pemerintah menetapkan kebijakan operasional, bahwa pendidikan kewiraan disertai beban sebagai penyelenggara Pendidikan Kewarganegaraan. Sehubungan dengan itu Pendidikan Kewiraan yang baru (Kep. Men. Dikbud No 056/U/1994) tidak lagi hanya menyelenggarakan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara seperti ditentukan oleh penjelasan UU No 2 tahun 1989 tersebut di atas, tetapi juga harus memikul fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.

### Pengembangan Materi Bahan Ajar Pendidikan Kewiraan

#### 1. Muatan awal materi pendidikan kewiraan

Sejak awal pendidikan kewiraan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi, muatan materi kewiraan meliputi pokok bahasan (a) Wawasan Nusantara, (b) Ketahanan Nasional, (c) Politik dan strategi nasional, (d) Politik dan strategi Hankam, (e) Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Lemhannas, 1996:6-8).

Materi pendidikan kewiraan dengan 5 pokok bahasan itu kemudian dikemas dalam suatu buku dengan judul "Kewiraan Untuk Mahasiswa" yang disusun oleh Lemhannas dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarso mengenai "Potret Pendidikan Kewiraan dan Relevansinya pada Era reformasi" yang dilakukan terhadap dosen pendidikan Kewiraan di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2000 dapat disimpulkan sebagai berikut

- (1) Rumusan dan uraian materi pendidikan kewiraan dalam buku "Kewiraan Untuk Mahasiswa" masih bersifat uraian suatu doktrin dan berorientasi pada pengetahuan militer/Hankam. Oleh sebab itu sulit untuk dipahami oleh para dosen kewiraan non ABRI serta sulit untuk dipahami oleh para mahasiswa
- (2) Dalam buku tersebut, tidak ada penjelasan atau pengantar, yang menjelaskan antara lain mengapa kewiraan diberikan, apa tujuan yang ingin dicapai, apa kaitan antara tujuan kewiraan dengan pokok-pokok bahasan dalam kewiraan, apa hubungan pendidikan kewiraan dengan pengetahuan dengan bidang ilmu lain
- (3) Bahwa materi pendidikan kewiraan itu adalah pengetahuan yang sifatnya multidisipliner, tetapi materinya belum menggambarkan kemajuan-kemajuan bidang ilmu pendukungnya (Sunarso, 1000:23)

Buku Pokok-pokok Kewiraan yang pertama kali disusun pada tahun 1975 dan diterbitkan sebagai buku kewiraan Untuk Mahasiswa pada tahun 1979 yang dipakai sebagai bahan perkuliahan Pendidikan Kewiraan oleh mahasiswa mengalami perubahan dan perbaikan pada penerbitan ulang tahun 1987

Dalam 12 tahun ini telah banyak terjadi perkembangan strategis, Politik Strategi Nasional, Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional, serta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, sebagai bahan kuliah wajar bila timbul kebijaksanaan dan pendekatan baru dalam proses pengajaran sebagai akibat dari upaya peningkatan efektivitas proses belajar mengajar yang senantiasa diusahakan pertumbuhannya

Pada tahun 1982 misalnya, telah diundangkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dalam tahun yang sama Menteri Hankam Pangab menetapkan pula doktrin hankamrata dengan surat keputusannya Nomor Skep/820/82. Di bidang pelaksanaan kurikulum pada tahun 1981 telah ditetapkan sebuah pedoman kurikulum inti bagi Perguruan Tinggi (Keputusan Menteri P dan K, Nomor 1212/U/1981) dan disusul dengan penetapan kurikulum inti mata kuliah dasar umum (MKDU) oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Keputusan Dirjen Dikti, Nomor 25/Dikti Kep/1985)

Surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan 1 Februari 1985, Nomor 061/U/1985 dan Nomor Kep/002/II/1985, menggariskan pola pembinaan Pendidikan Kewiraan di lingkungan perguruan tinggi. Untuk mewujudkan pembinaan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Kelompok Kerja Tahap Pembinaan Pendidikan Kewiraan (disingkat Pokja Bindikra) di lingkungan perguruan tinggi yang beranggotakan unsur-unsur Ditjen Dikti Depdikbud, Ditjen Persmanvet Dep Hankam Kasum ABRI dan Lemhannas

Pokja Bindikra bertugas membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan kewiraan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk fungsi

disamping fungsi pembinaan lainnya di bidang tenaga akademik, organisasi dan pengelolaan dan sebagainya. Pokja mempercayakan kepada Lemhannas untuk merancang dan mengelola kursus calon dosen kewiraan, menyusun materi ajaran serta buku sumber baik bagi mahasiswa maupun buku pegangan dosen (Lemhannas, 1996: xiii)

Dalam rangka pelaksanaan beban tugas tersebut Gubernur Lemhannas telah menunjuk sebuah Tim dengan Skep/56/VII/1986, yang bertugas meninjau kembali buku kewiraan Untuk Mahasiswa terbitan 1979 sebagai bahan

kuliah Kewiraan dilingkungan perguruan tinggi. Hasil peninjauan ulang tersebut ialah naskah buku yang kemudian disahkan oleh Gubernur Lemhannas menjadi buku Kewiraan Untuk Mahasiswa tahun 1987.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi menyadari bahwa sebagai buku pegangan mahasiswa buku Kewiraan Untuk Mahasiswa edisi tahun 1987 ini tentunya masih memerlukan penyesuaian terus menerus, karena sebagai bahan kuliah dari sebuah kurikulum yang bersifat proses tanpa akhir.

2. Upaya yang telah dilakukan untuk membenahi materi Pendidikan Kewiraan selama ini.

Menyadari akan kekurangan-kekurangan dari materi pendidikan kewiraan seperti dikemukakan di atas, serta dalam rangka memenuhi amanat dari UU No 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan Keamanan negara dan UU No 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan nasional, keduanya telah mengakomodasikan pendidikan kewiraan, maka telah dilakukan upaya peningkatan dan penyempurnaan muatan materi pendidikan kewiraan antara lain:

- (1) Buku kewiraan untuk mahasiswa, telah disempurnakan lagi oleh Lemhannas melalui penerbitan tahun 1991, antara lain dengan menambahkan muatan materi dengan judul: "Pengantar Pendidikan Kewiraan: Sayangnya materi dalam pengantar tersebut belum memberikan kejelasan atau jawaban permasalahan yang telah dikemukakan di atas tadi.
- (2) Diselenggarakan seminar dan lokakarya pendidikan kewiraan pada bulan Mei tahun 1991 oleh UPN Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan untuk menyempurnakan muatan materi

Nasional; (d) Politik Nasional dan Strategi Nasional; (e) Pengetahuan Hankam (Hastanas, 1997)

dipadukan menjadi pengetahuan Pertahanan Keamanan dengan argumentasi bahwa tidak mungkin memahami Politik Staregi Nasional yang antara lain menjelaskan tentang pembangunan hankam dengan baik sebelum memahami konsepsi hankam secara menyeluruh, antara lain yang memuat sistem hankamrata. Oleh karena itu kedua materi dipadukan menjadi satu dengan judul Pengetahuan Pertahanan Keamanan. Di dalam pokok bahasan Pengetahuan Pertahanan Keamanan terlebih dahulu dijelaskan konsepsi pertahanan keamanan secara menyeluruh termasuk Sistem Hankamrata, dan kemudian dijelaskan Polstra Hankam untuk masa 5 tahun yang sedang berjalan.

#### **Upaya menata kembali Pendidikan Kewiraan Produk Orde Baru agar tetap relevan dalam era Reformasi**

##### **a. Alasan masih perlunya Pendidikan Kewiraan**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarso di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa Pendidikan Kewiraan tidak luput dari sorotan tajam, baik terhadap para pengajar, sistem dan metode, maupun nama dan materi yang diberikan dianggap sebagai indoktrinasi ABRI/TNI atau militerisme. Meskipun anggapan ini tidak benar, tetapi karena opini sangat kuat dapat menjadikan anggapan tersebut seolah-olah benar (Sunarso, 2000:27).

Menurut pendapat penulis bahwa

dari belenggu krisis dan ancaman disintegrasi maupun persaingan global

Pada jenjang perguruan tinggi (S1) di Amerika serikat juga diberikan mata kuliah *Civic Education* semacam pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah *American History Humanity* dan *Philosophy* sebagai mata kuliah *General Education* semacam MKU di Indonesia Begitu juga di Jepang ada mata kuliah *Japanese History Lit* dan *Philosophy* Sedangkan di Philipina diberikan mata kuliah *Philipinos, Family Palanning Tax Sevston Land Reform, Human Right* serta *The Philipinc New Constitution* (Ceramah Dirjen Dikti, di Cisarua 29 Februari 2000)

Penulis sepakat bahwa Pendidikan Kewiraan perlu direvisi materi, metoda pengajarnya, buku pegangannya, serta ditingkatkan kualitas dosennya Agar kewiraan dapat lebih diterima oleh semua kalangan, penulis mengusulkan untuk merubah nama mata kuliah tersebut dengan nama yang tidak berkonotasi militer, misalnya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan Walaupun pada dasarnya kewiraan bukan pendidikan militer, pendidikan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kecintaan mahasiswa pada tanah airnya akan tetapi sudah terlanjur berkonotasi dengan militer Alasan lain untuk mengganti nama pendidikan kewiraan menjadi pendidikan kewarganegaraan selain alasan di atas juga didasarkan pasal 39 ayat (2) UU tentang Sisdiknas mengamanatkan perlunya pendidikan kewarganegaraan diberikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan tinggi bersama-sama dengan Pancasila dan Pendidikan Agama dan disitu tidak dikenal nama kewiraan

#### b Materi Pendidikan Kewiraan

Berkaitan dengan revisi materi, sebaiknya pokok bahasan Polstrans Polstrahankamnas dan Sishankamrata dihilangkan saja dan sebagai penggantinya menambah pokok bahasan mengenai hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup, perdagangan bebas dan otonomi daerah (Sunarso, 1997)

Penulis yang juga pengampu mata kuliah kewiraan berpendapat bahwa naskah Kewiraan yang ada selama ini masih sarat dengan doktrin Isi yang terkandung banyak yang sudah tidak relevan lagi, seperti adanya istilah yang berbau militerisme, adanya materi yang bersifat

militeristik, banyak materi yang kurang bersifat universal sebagaimana lazimnya materi kuliah

Oleh karena itu sebaiknya bentuk naskah kewiraan disusun dalam tulisan ilmiah hapusan bentuk doktrin yang memasukkan dasar-dasar hukum dan sebagainya, kecuali dasar pemikiran secara universal Atau naskah lebih baik dibuat dalam bentuk modul

Sedangkan yang berkaitan dengan materi sebaiknya menghapus atau mengganti materi yang tidak relevan dengan kondisi aktual antara lain istilah yang dianggap militeristik dan orde baru, materi yang bersifat doktrin militer, peraturan yang tidak relevan yang mudah berubah, kecuali ideologi dan UUD namun dalam bentuk referensi ilmiah Ada baiknya juga bila materi ditambah dengan nilai-nilai kebangsaan globalisasi, demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan bebas dan otonomi daerah

#### c Metode pengajaran

Selanjutnya yang berkaitan dengan metode mengajar sebaiknya metode ceramah dibatasi dan metode diskusi diperbanyak Selain dua metode di atas perlu dikembangkan metode studi kasus, simulasi, Widva wisata serta demonstrasi Demikian pula pada umumnya para dosen berpendapat akan pentingnya pendidikan luar sekolah untuk diberdayakan, mengingat keberhasilan pendidikan secara luas merupakan *schooling for learning* Lebih ideal lagi jika penyelenggara pendidikan dapat menciptakan situasi yang menarik Penggunaan berbagai metode tersebut dimaksudkan agar pembelajaran menjadi lebih menarik serta dapat meningkatkan kemampuan analisis dari mahasiswa

Sebagian besar dosen kewiraan menyadari bahwa mata kuliah ini sedang mendapat sorotan dan hujatan yang cukup tajam dari berbagai pihak khususnya dari mahasiswa Banyak materi yang dianggap kurang menarik, bahkan lebih dianggap sebagai kewajiban atau beban daripada sebuah kebutuhan bagi mahasiswa Oleh karena itu merupakan tantangan bagi dosen untuk membuat mata kuliah ini menjadi menarik, menjadi dibutuhkan dan menjadi relevan dengan semangat reformasi

#### d Peranan Dosen

Para dosen menyadari bahwa peranan mereka dalam proses belajar merupakan kunci utama suksesnya pendidikan. Sehingga tuntutan peningkatan kualitas melalui sarana pendidikan formal dan penambahan wawasan melalui lingkungan, media masa cetak maupun elektronika merupakan kebutuhan utama. Oleh karena itu perlu disadari bahwa para dosen kewiraan tidak hanya mengajarkan berdasarkan literatur tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi, kultur, dan budaya daerah. Untuk pendidikan formal diperlukan peningkatan kualitas dosen kewiraan baik dari kalangan sipil maupun militer mengikuti pendidikan S2 Tannas, mengikuti kursus peningkatan dosen kewiraan (Suskat) di Lemhannas serta penataran dan lokakarya (Pentaloka) disetiap Kodam.

#### Penutup

Pendidikan kewiraan mulai diberikan di Perguruan Tinggi sejak tahun ajaran 1973/1974, dengan lima materi pokok yaitu Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional, Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional dan Sishankamrata. Agar sejalan dengan semangat reformasi dalam menuju Indonesia Baru perlu penataan kembali.

Berkaitan dengan revisi materi, sebaiknya pokok bahasan Polkstranas, Polstrahankamnas dan Sishankamrata dihilangkan dan sebagai penggantinya memasukkan pokok bahasan mengenai hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup, perdagangan bebas dan otonomi daerah.

Selanjutnya yang berkaitan dengan metode mengajar sebaiknya metode ceramah dibatasi, dan metode diskusi dan studi kasus diperbanyak. Dosen kewiraan diharapkan tidak hanya mengajarkan materi pendidikan Kewiraan berdasarkan literatur tetapi dapat juga menyesuaikan dengan kondisi, kultur dan budaya daerah.

Agar kewiraan dapat diterima oleh semua kalangan, penulis mengusulkan untuk merubah nama mata kuliah tersebut dengan nama yang tidak berkonotasi dengan militer, misalnya menjadi Pendidikan Kewirganegaraan.

#### Daftar Pustaka

- Dirjen Dikti (1997) *GBPP Mata Kuliah Pendidikan Kewiraan* Jakarta: Dirjen Dikti
- Dirjen Dikti (1983/1984) *Modul Akta Mengajar V* Jakarta: Dirjen Dikti
- Hastanas (1997) *Jurnal Himpunan Alumni Ketahanan Nasional* Jakarta
- Lemhanas (1996) *Kewiraan Untuk Mahasiswa* Jakarta: Gramedia
- Lemhanas (1997) *Kewiraan (Buku Induk Pendidikan Kewiraan Kewarganegaraan)* Pokja Kewiraan Lemhannas dan Depdikbud
- Lemhannas (2000) *Rumusan Hasil Seminar Materi dan kurikulum Pendidikan Pendahuluan Bela Negara* (Cisarua 29 Februari - 2 Maret 2000)
- Sayidiman Suryohadiprojo (2000) *Program Kewiraan Dalam Era Reformasi (Makalah seminar Kurikulum Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Cisarua 29 Februari - 2 Maret 2000)*
- Sunarso (2000) *Potret Pendidikan Kewiraan dan relevansinya pada era reformasi (Laporan Penelitian)* FIS Universitas Negeri Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 *Tentang pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara*
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*